

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pandangan etika politik yang dimiliki oleh Arkoun sendiri dalam memaknai negara hukum demokratis menurut penulis sejalan. Kesesuaian tersebut dikarenakan etika politik Arkoun tidak terfokus kepada formalisasi negara Islam, namun hal terpenting adalah adanya penanaman nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa juga bernegara yang dikombinasikan dengan keterbukaan rasio dari Barat, sehingga nantinya kebebasan berpikir yang menjadi salah satu indikator keadaan demokratis dapat terwujud.

B. Saran

1. Sebagai perwujudan negara hukum demokratis, maka perlu kiranya untuk merumuskan regulasi terkait kewajiban penanaman etika politik sejak dini dalam pranata sekolah juga keluarga khususnya. Hal ini diperlukan, agar nantinya apabila mereka beranjak dewasa dan memilih untuk berkarier dalam birokrasi pemerintah, tidak terjadi perilaku cacat nalar seperti korupsi dan penyelewengan kekuasaan dikarenakan sejak dini telah ditanamkan mengenai pentingnya etika, khususnya dalam kehidupan berpolitik.

2. Perlu dilakukan dialog intelektual demi mencerdaskan masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam alinea keempat bahwasanya negara wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi sesat nalar yang mengarah kepada Islam fundamentalis sebagai solusi atas bobroknya kondisi negara saat ini. Pelaksanaan dialog intelektual tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban institusi perguruan tinggi. Sehingga nantinya para peneliti, akademisi, termasuk juga di dalamnya mahasiswa, dapat membawa penanaman etika, kesadaran hukum, serta penanaman nalar yang tepat kepada masyarakat.
3. Diperlukan penanaman kesadaran moral disertai etika tanggung jawab yang baik dalam setiap insan yang ada di negara ini sehingga tujuan terwujudnya masyarakat madani dapat terwujud.
4. Elite politik diharuskan untuk mementingkan kepentingan rakyat dan negara dalam membuat suatu kebijakan, bukan sebagai corong pembuat kebijakan bagi *oligark* tertentu.
5. Rekomendasi dari penulis kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat isu serupa yakni bandingkan etika politik Arkoun dengan salah satu teori pemikir Muslim yang pandangannya mengarah kepada formalisasi negara Islam seperti pemikiran zaman klasik. Hal ini diharapkan agar terdapat studi komparatif terkait isu etika politik Arkoun.